

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jasa transportasi memegang peranan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu negara. Transaksi ekonomi menjadi penggerak perekonomian, dan untuk memperlancar peningkatan kualitas dan kuantitas transaksi perdagangan serta menjangkau pasar lintas pulau, negara, dan benua, diperlukan jasa transportasi khusus, khususnya transportasi laut. Keberadaan jasa transportasi laut menurut Tobing (2015) sebagai sarana pendukung diharapkan dapat semakin memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pelabuhan Batam sebagai gerbang utama lalu lintas barang dan penumpang di kawasan Indonesia bagian barat memiliki peran yang sangat strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Efisiensi proses kedatangan (*clearance in*) dan keberangkatan kapal (*clearance out*) menjadi kunci dalam menjaga kinerja *Person In Charge* Gultom & Ginting (2024).

Manajemen kinerja *Person In Charge* sangat berpengaruh terhadap efisiensi proses *clearance in* dan *out* kapal. Memperhatikan peran *Person In Charge* seperti bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan proses *clearance in* dan *out* kapal. Dukungan fasilitas dan infrastruktur Pelabuhan yang baik dapat mendukung kinerja *Person In Charge* dalam menjalankan tugasnya, serta praktik manajemen yang baik, Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan.

Beberapa penelitian terdahulu tentang manajemen kinerja terhadap efisiensi proses *clearance in* dan *out*. Habeahan, n.d (2024) berpendapat bahwa manajemen kinerja *Person In Charge* dalam menangani *clearance in* dan *out* kapal sangatlah dipengaruhi oleh kemampuan dan kerjasama dengan pihak terkait, Kerjasama *Person In Charge* yang baik berpengaruh positif pada kualitas pelayanan *clearance in* dan *out*. Mulyawan et al (2019) Menyatakan bahwa *Person In Charge* berpengaruh positif terhadap proses *clearance in* dan *out*. Wardhani, n.d

(2023) Pemahaman mendalam terhadap prosedur *clearance in* dan *out* berpengaruh positif terhadap manajemen kinerja *Person In Charge* di PT. Barito Samudra Sejahtera. Namun penelitian ini dibantah penelitian yang dilakukan oleh Dirhamsyah, Rispianti (2021) yang menyatakan bahwa peran *Person In Charge* dalam menangani *clearance in* dan *out* kapal asing telah berhasil menangani proses *clearance in* dan *out* tersebut dengan efektif. Namun, kurangnya efisiensi dalam menangani proses *clearance in* dan *out*, dikarenakan pengurusan dokumen kapal sertifikat habis masa berlaku, dan terlambat perpanjangan sertifikat kapal sehingga berpengaruh negatif terhadap proses *clearance in* dan *out*.

Peneliti telah melakukan pengamatan di PT. Pandawa Samudera Indonesia pada bulan Februari hingga Juli 2024. PT. Pandawa Samudera Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang agen perkapalan. diharapkan PT. Pandawa Samudera Indonesia dapat berperan aktif dalam pelayanan jasa agen kapal.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ditemukan data terkait manajemen kinerja *person in charge* terhadap efisiensi proses *clearance in* dan *out* pada PT. Pandawa Samudera Indonesia sebagai berikut :

Tabel 1. 1Manajemen Kinerja Person In Charge dalam Efisiensi Proses Clearance In dan Out

No	Kegiatan Person In Charge	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Aktual	Keterangan
1	Penerimaan Dokumen	Ketepatan waktu penerimaan dokumen lengkap	Hari	≤ 1 hari	1 hari	<i>Person in charge</i> berhasil menerima semua dokumen dengan baik, namun perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk mempercepat proses penerimaan dokumen.
2	Koordinasi dengan	Waktu respons	Jam	≤ 7 jam	8 jam	Hal ini mengindikasikan

	Instansi Terkait	terhadap permintaan informasi				adanya potensi perbaikan dalam proses koordinasi
		Jumlah pertemuan koordinasi yang dilakukan	Kali/ bulan	≥ 13 kali	15 kali	Komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana
3	Pengurusan Perizinan	Waktu penyelesaian pengurusan izin	Jam	≥ 8 jam	9 jam	Proses pengurusan perizinan telah melampaui target waktu yang ditetapkan
4	Pemberian Informasi ke Kapal	Ketepatan waktu pemberian informasi	Jam	≤ 24 jam	24 jam	Proses penyampaian informasi kepada kapal berjalan sesuai dengan target, pihak kapal selalu mendapatkan informasi terbaru dalam waktu yang memadai untuk mengambil tindakan selanjutnya.
		Tingkat kepuasan nakhoda terhadap informasi yang diberikan	Skala Likert (1-5)	≥ 5	5	Nakhoda sangat puas dengan informasi yang diberikan oleh pihak agen
5	Penutupan Proses	Waktu penyelesaian penutupan proses	Hari	≤ 7	12	Proses tersebut mengalami keterlambatan signifikan sebesar 5 hari dari batas waktu maksimum yang telah ditetapkan

Sumber : Diolah untuk Kebutuhan Penelitian Tahun 2025

Tabel 1.1 manajemen kinerja *Person In Charge* dalam efisiensi proses *clearance in* dan *out* menunjukkan bahwa kegiatan – kegiatan yang terkait dengan penerimaan dokumen, pemberian informasi kepada pihak kapal, telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun, ada area yang perlu diperbaiki seperti penutupan proses mengalami keterlambatan yang signifikan sebesar 5 hari dari batas yang ditetapkan, terjadinya keterlambatan dikarenakan koordinasi dengan instansi terkait, pengurusan perizinan yang melebihi target waktu yang ditentukan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan simplifikasi prosedur atau penambahan sumber daya manusia, kemudian koordinasi dengan instansi terkait.

Penerapan Manajemen kinerja *Person In Charge* di PT. Pandawa Samudera Indonesia ada yang sudah dan belum diterapkan namun perlunya penekanan yang kuat. Manajemen kinerja yang belum diterapkan yaitu pengembangan kinerja karyawan melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terarah dan optimalisasi, proses kerja seperti program pelatihan dan pengembangan karir agar *Person In Charge* lebih teliti dan giat, manajemen kinerja yang sudah diterapkan namun perlunya ketegasan di PT. Pandawa Samudera Indonesia adalah perencanaan, pemantauan dan evaluasi agar proses *clearance in* dan *out* lebih efisien.

Menurut Anwar et al (2021), *Clearance in* dan *out* merupakan tugas dari agensi PT Pandawa Samudera Indonesia, yang melaporkan kedatangan dan keberangkatan kapal, kondisi kapal dan kru, membayar pengelolaan fasilitas di laut dan mengajukan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dari Syahbandar Agen lokal pada dasarnya adalah *person in charge* yang mewakili pemilik kapal dan memproses dokumen-dokumen seperti *crew list* (daftar awak kapal), permohonan izin, sertifikat registrasi kapal (SPB), sertifikat tonase/surat ukur, sertifikat kesehatan, daftar muatan kapal, data kapal, dan lain-lain.

Tabel 1. 2 Keamanan dan Keselamatan Proses *Clearance In dan Out*

No	Aspek Keamanan dan Keselamatan	Detail Pemeriksaan	Tujuan
1	Pemeriksaan Dokumen	Sertifikat kapal, sertifikat keselamatan, surat izin berlayar, dokumen penumpang (paspor, visa), dan surat penunjukkan agen	Memastikan kelayakan kapal, legalitas muatan dan kualifikasi awak kapal
2.	Pemeriksaan Fisik Kapal	Kondisi mesin, peralatan keselamatan	Memastikan kapal dalam kondisi layak laut dan aman untuk berlayar
3	Pemeriksaan Kesehatan	Penumpang dan awak kapal	Mencegah penyebaran penyakit menular

Sumber : Diolah untuk kebutuhan Penelitian Tahun 2025

Proses ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen kapal, kondisi fisik kapal, serta kesehatan penumpang dan awak kapal. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa kapal, muatan, dan seluruh personel di dalamnya memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. dengan demikian risiko terjadinya di kecelakaan di laut, penyelundupan barang ilegal dan penyebaran penyakit dapat diminimalkan. Pemeriksaan dokumen seperti surat kelayakan dan daftar lengkap mengenai penumpang, awak kapal bertujuan untuk memverifikasi legalitas operasi kapal dan muatannya. Sementara itu, pemeriksaan fisik kapal mencakup kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kesiapan kapal untuk berlayar dan pemeriksaan kesehatan memastikan bahwa tidak ada penyakit menular yang dibawa oleh penumpang atau awak kapal. Pasal 117 (UU No.17 tahun, 2008)

Jika terjadinya keterlambatan proses *clearance in* dan *out* dalam 10 hari (1 etmal) maka akan ada biaya tambahan untuk setiap masa 10 hari berikutnya.

Tabel 1. 3 Biaya keterlambatan *clearance out*

No	Keterangan	Nominal
	Bayar ke Negara Tergantung GRT (<i>Gross Registered Tonnage</i>)	
1	Biaya labuh	Rp 373.548,00
2	Biaya tunda	Rp 9.400.230,00
3	<i>Vassel Traffic Services</i> (VTS)	Rp 401.600,00
4	Biaya pandu	Rp 2.500.000,00
5	Biaya Koordinasi Dengan Instansi Terkait	
	- Karantina	Rp 450.000,00
	- Imigrasi	Rp 450.000,00
	- Syahbandar	Rp 800.000,00
	- Pemeriksaan dokumen	Rp 200.000,00
	- Kepelautan	Rp 100.000,00
	- Simlala	Rp 300.000,00
	- Faktur lunas	Rp 400.000,00
	- Satker	Rp 75.000,00
6	Biaya transportasi, telekomunikasi dan akomodasi	Rp 10.000.000,00
	JUMLAH	Rp 25.450.378,00

Sumber : Diolah untuk Kebutuhan Penelitian Tahun 2025

Biaya GRT (*Gross Registered Tonnage*) adalah ukuran volume internal kapal dalam “*ton register*”, biaya labu pandu tunda bervariasi tergantung pada jenis kapal, ukuran dan jenis jasa yang dibutuhkan, serta lokasi pelabuhan. Rambu VTS (*Vessel Traffic Service*) adalah rambu atau tanda yang digunakan dalam sistem untuk memandu dan mengatur lalu lintas kapal dan membantu mencegah kecelakaan dan meningkatkan keamanan pelayaran.

Biaya penggunaan tugboat diperlukan untuk membantu kapal dalam proses menambat dan melepaskan tambatan tali. Umumnya, biaya tugboat dikenakan dua kali, tergantung pada jumlah jam yang dibutuhkan selama proses tersebut. Berdasarkan Peraturan Transportasi Indonesia PM 121 tahun 2018, yang merupakan perubahan dari PM No. 72 tahun 2017, terdapat aturan yang mengatur

tentang jenis, struktur, kelompok, dan mekanisme dalam penetapan biaya pelabuhan.

Pemanduan pada Pasal 9 No. 3 dijelaskan mengenai cara menentukan biaya orientasi. Keterlambatan dihitung dengan cara mengalikan jumlah kapal yang mengalami penundaan dengan *Gross Tonnage* (GT) kapal tersebut, dalam satuan GT per jam. Biaya **Agensi** yaitu biaya yang timbul dari waktu dan servis yang telah diberikan general dan local agent saat mengageni kapal milik ship owner. Biaya – biaya yang timbul, khususnya pada bidang general agency, merupakan biaya transportasi, telekomunikasi dan akomodasi sekaligus perantara antara ship owner dan local agency (Cristo, 2019)

Person In Charge harus berkoordinasi dengan kapten kapal untuk port selanjutnya, jika salah pelabuhan maka perlu pembayaran lagi. Jika terjadinya keterlambatan maka melakukan *Re-clearance* (clearance ulang) dan biaya nya sama seperti *clearance* awal. Biaya tersebut diserahkan langsung ke petugas, untuk mencegah keterlambatan atau *re- clearance* maka *Person In Charge* harus teliti dalam pengurusan dokumen, dokumen harus sudah dikumpulkan seminggu sebelum berangkat dan melakukan pengecekan kembali dokumen tersebut mati atau tidak karna dokumen harus di endors 1x/2 tahun untuk menghindari biaya tambahan tersebut dan proses *clearance in* dan *out* menjadi efisien. Biaya tambahan jika terlambat yang tanggung yaitu pihak kapal bukan perusahaan, maka dari itu diharapkan *Person In Charge* dapat bekerja dengan teliti agar pihak kapal tidak merasakan rugi.

Tabel 1. 4 Frekuensi Keterlambatan *Clearance Out* dan Waktu Tunggu Per Tahun 2024

No	Bulan	Kapal	<i>Clearance out</i> dijadwalkan	<i>Clearance out</i> aktual	Tunggu (jam)	Keterlambatan
1	Mei	Julia	12.00	14.00	2 jam	Masalah teknis
2	Juni	ST. Harmoni	15.00	18.00	3 jam	Masalah teknis
		VS Glory	13.00	15.00	2 jam	Dokumen tidak lengkap
3	Agustus	Ratu giok	12.00	13.00	1 jam	Kondisi cuaca
		Mariana golden	15.00	18.00	3 jam	Dokumen tidak lengkap
4	Oktober	Sewali	11.00	12.00	1 jam	Kondisi cuaca
		MV. Odete	16.00	17.00	1 jam	Kondisi cuaca
		Sunny liger	16.00	18.00	2 jam	Masalah teknis
5	November	Tirta samudra	15.00	18.00	3 jam	Dokumen tidak lengkap

Sumber : Diolah untuk Kebutuhan Penelitian Tahun 2025

Tabel 1.4 menjelaskan bahwa terjadi beberapa kali keterlambatan dengan durasi antara 1 hingga 3 jam, disebabkan oleh masalah teknis, dokumen tidak lengkap, dan kondisi cuaca. Keterlambatan akibat masalah teknis mengindikasikan perlunya peningkatan pemeliharaan kapal, sementara keterlambatan dokumen menunjukkan kurangnya ketelitian dalam administrasi. Kondisi cuaca juga menjadi faktor penghambat, meskipun di luar kendali langsung. Waktu tunggu yang tercatat menunjukkan adanya waktu tambahan yang tidak produktif, yang secara keseluruhan berdampak pada biaya operasional dan jadwal pelayaran. keterlambatan *clearance out* dan waktu tunggu, terlihat bahwa keterlambatan ini memiliki dampak finansial yang signifikan. Setiap jam keterlambatan berkontribusi pada akumulasi biaya-biaya tersebut.

Biaya-biaya ini mencakup berbagai aspek, mulai dari biaya langsung yang dibayarkan ke negara hingga biaya operasional seperti transportasi dan akomodasi. Hal ini menggarisbawahi pentingnya efisiensi dalam proses *clearance in* dan *out* kapal. Setiap keterlambatan tidak hanya menghambat operasional kapal, tetapi juga menambah beban biaya yang cukup besar bagi perusahaan. Oleh

karena itu, Untuk meningkatkan efisiensi, PT. Pandawa Samudera Indonesia perlu memperbaiki manajemen dokumen, membuat rencana kontingensi untuk kondisi cuaca buruk, dan meningkatkan koordinasi antar pihak terkait.

Fasilitas dan infrastruktur yang memadai juga diperlukan untuk memperlancar transportasi laut, baik dari segi pelayanan pelabuhan pada saat kedatangan kapal (*clearance in*) dan keberangkatan kapal (*clearance out*), maupun fasilitas di dalam pelabuhan. Perusahaan pelayaran yang bergerak di bidang keagenan kapal memegang peranan penting di sini. memberikan pelayanan kepada kapal yang tiba berangkat dari pelabuhan.

Inaportnet merupakan salah satu fasilitas dalam proses *clearance in* dan *out* dalam pengurusan dokumen. Menurut Andromeda, n.d.(2020) Pengguna dapat dibantu dan dilayani dengan menggunakan sistem Inaportnet. Teknologi Inaportnet juga dapat mempercepat waktu perputaran kapal, yang memungkinkan kapal untuk menghindari penundaan yang dapat berdampak negatif pada hasil penelitian dengan meningkatkan waktu keberangkatan yang diantisipasi (ETD) Simatupang, Trisanti, n.d (2022) menemukan bahwa fasilitas PT Bahari Eka Nusantara cabang Samarinda secara signifikan meningkatkan kinerja staf baik di dalam maupun di luar perusahaan pelayaran. Azizah, Karubaba, Yulianingsih, Idris, n.d.(2024) menyatakan pentingnya menggabungkan platform elektronik seperti Inaportnet ke dalam layanan maritim untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, keamanan, dan transparansi layanan pelabuhan secara keseluruhan. Tertulis di Menteri Perhubungan (2014) Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 65 tahun 2010 tentang struktur dan operasional kantor Syahbandar, serta kantor Syahbandar, yang telah dimodifikasi dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 44 tahun 2011, telah memperkuat kemampuan pelabuhan dalam menangani kapal. Sebagai hasilnya, operasi ditangani dengan lebih cepat dan efektif. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 (2021) menyatakan bahwa pelabuhan adalah wilayah daratan atau lautan yang dibatasi yang digunakan untuk tujuan komersial dan pemerintahan. Dermaga, lokasi untuk merapat atau menambatkan kapal, area untuk menumpuk kargo, penumpang yang menunggu untuk naik dan turun, dan area untuk bongkar muat kargo adalah

contoh fasilitas pelabuhan. Selain itu, pelabuhan memiliki tempat berlabuh kapal dan terminal dengan fasilitas keselamatan navigasi, yang mendukung operasi pelabuhan dan berfungsi sebagai tempat untuk pergerakan transportasi intra atau intermoda (penanganan). Ruang yang terencana dengan baik dan fasilitas yang sesuai, serta dukungan infrastruktur untuk prosedur administrasi yang efisien, memiliki dampak positif pada proses penanganan masuk dan keluar. Penelitian ini dibantah oleh Yudika, Firjatullah, n.d.(2024) menyatakan bahwa kendala dalam penggunaan system inaportnet yang belum terintegrasi dengan instansi *Vessel Traffic Service* (VTS) berdampak pada kinerja agen kapal, khususnya bidang *Person In Charge* baik saat meninggalkan kapal maupun saat melakukan prosedur penanganan di atas kapal. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan menjadi tidak efisien. Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas dan infrastruktur berkaitan erat dengan manajemen kinerja *Person In Charge* dan proses *clearance in* dan *out*.

Peneliti sudah melakukan pengamatan di PT. Pandawa Samudera Indonesia, peneliti menemukan data fasilitas dan infrastruktur sebagai berikut :

Tabel 1. 5 Fasilitas dan Infrastruktur

No	Fasilitas & Infrastruktur	Komponen Utama	Manfaat	Tingkat Ketersediaan (skala 1-5)	Kondisi	Keterangan
1.	Pelabuhan		Memudahkan penyimpanan barang dan mengurangi biaya logistik	5	Baik	Keberadaan kondisi fasilitas di Pelabuhan sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi dalam proses logistic.
2.	Jaringan Komunikasi	Internet, telepon	Mempermudah komunikasi yang lancar antar pihak	4	Baik	Jaringan komunikasi yang efektif merupakan

			terkait dan mempercepat koordinasi			elemen penting dalam mendukung kelancaran proses <i>clearance in</i> dan <i>out</i> dan mempercepat pengambilan keputusan
3.	Sistem Informasi	E-clearance (Imigrasi), Sinkarkes (Karantina), Inaportnet (Syahbandar), B-sims (BP Batam), Ion Beta (Bea Cukai Batam)	Mempercepat proses administrasi, mengurangi kesalahan data dan meningkatkan transparansi	5	Baik	System informasi yang efisien sangat penting dalam mendukung kelancaran proses administrasi Pelabuhan, meningkatkan efektivitas operasional
4.	Fasilitas Pendukung	Hotel crew, transportasi penjemputan crew dll	Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi petugas dan pengguna jasa	3	Cukup	Fasilitas pendukung yang memadai membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik untuk petugas dan pengguna jasa

Sumber : Diolah untuk Kebutuhan Penelitian Tahun 2025

Tabel 1.5 dapat disimpulkan bahwa fasilitas dan infrastruktur Pelabuhan yang dinilai sangat baik dan menjadi penghubung antara fasilitas dan infrastruktur terhadap efisiensi proses *clearance in* dan *out*. Keberadaan dermaga container, yard, dan peralatan bongkar muat yang modern serta system informasi yang terintegrasi seperti e-clearance, sinkarkes, inaportnet, B-sims, dan Ion Beta telah memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat proses administrasi,

mengurangi kesalahan data, meningkatkan transparansi dan meningkatkan efisiensi kerja. Dengan demikian, biaya operasional yang dikeluarkan untuk proses *clearance* kapal dapat ditekan secara signifikan, memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, jaringan komunikasi yang baik juga berperan penting dalam menunjang kelancaran koordinasi antar pihak terkait. Dengan demikian, fasilitas dan infrastruktur yang memadai dan baik akan sangat mendukung efisiensi proses *clearance in* dan *out* kapal dan manajemen kinerja *Person In Charge*.

Pratama et al., (2024) mengatakan bahwa manajemen kinerja agen terutama bidang *Person In Charge* dapat berkoordinasi antar instansi melalui pembentukan tim koordinasi antar instansi di dalam pelabuhan untuk mempercepat proses persetujuan dan mengurangi duplikasi, serta melalui pengembangan sistem informasi terpadu untuk pemanfaatan infrastruktur, fasilitas, dan sistem informasi berbasis teknologi di dalam pelabuhan, peralatan di pelabuhan untuk mendukung proses *clearance in* dan *out*. Pasal 121 (UU No.17 tahun, 2008) Investasi dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing suatu negara. Pelabuhan yang memiliki fasilitas modern dan lengkap akan lebih menarik bagi kapal-kapal asing untuk bersandar, sehingga dapat meningkatkan volume perdagangan. Selain itu, peningkatan efisiensi proses *clearance* juga akan berdampak positif terhadap perekonomian secara keseluruhan.

PT. Pandawa Samudera Indonesia Sebagai bisnis agen kapal, menerima jadwal kedatangan kapal dari pemilik kapal atau penyewa melalui surat pesanan melalui email yang mencakup informasi kapal dan jadwal docking dan undocking di galangan kapal Batam. Selanjutnya pemilik kapal atau penyewa juga akan memberikan alamat email kapal sehingga agen dapat berkomunikasi dengan kapten kapal untuk memperbarui posisi dan jadwal kedatangan kapal setiap hari. Agen berusaha memberikan layanan terbaik menurut Tobing (2015) untuk memastikan bahwa layanan perusahaan terus digunakan. Pelayanan yang baik akan memuaskan perusahaan pelayaran dan memberikan dampak positif bagi PT. Pandawa Samudera Indonesia.

Person In Charge di PT. Pandawa Samudera Indonesia sangat penting untuk operasi yang efisien dari setiap tahap prosedur penanganan kapal baik di dalam maupun di luar pelabuhan. *Person in charge* bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan memverifikasi bahwa dokumen yang diperlukan, termasuk Surat Persetujuan Berlayar (SPB), sudah lengkap. sertifikat kesehatan kapal dan bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum diserahkan ke pihak terkait, termasuk Syahbandar, Bea Cukai, dan Imigrasi. *Person In Charge* juga perlu mengawasi setiap langkah dalam proses *clearance in* dan *out* agar tidak ada tahapan yang tertunda dalam pengisian data di sistem inaportnet yang dapat mempengaruhi jadwal keberangkatan kapal.

Manajemen kinerja *Person In Charge* di PT. Pandawa Samudera Indonesia pernah mengalami penurunan karena sering menghadapi berbagai kendala seperti Jadwal kedatangan dan keberangkatan yang tidak pasti, antrean panjang di pelabuhan, masalah dengan dokumentasi kapal, terjadinya delay diatas kapal dikarenakan faktor cuaca, trouble engine pada kapal, kurangnya koordinasi antar instansi, kurangnya pemantauan sistem inaport oleh *Person In Charge* dapat menyebabkan masalah teknis seperti kesalahan input data atau gangguan koneksi. Penurunan kinerja *Person In Charge* mengakibatkan kapal menunggu lebih lama di pelabuhan, meningkatkan biaya operasional, dan menurunkan kepuasan pengguna jasa. Solusi dari PT. Pandawa Samudera Indonesia yaitu mengukur apakah fasilitas dan infrastruktur tersebut telah digunakan secara efisien, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, tetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan dan terukur, seperti waktu tingkat kesalahan atau biaya operasional. Selanjutnya, mengidentifikasi area yang kurang efisien, dan mencari penyebabnya. Gunakan pengukuran waktu proses *clearance in* dan *out*, kinerja petugas, kepuasan pelanggan dan biaya operasional sebagai metrik efisiensi. Berdasarkan hasil analisis, lakukan tindakan perbaikan, seperti peningkatan proses, pelatihan. Evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan efisiensi terus meningkat dan fasilitas serta infrastruktur mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

Hasil pengamatan peneliti terhadap *Clearance in* dan *out* PT. Pandawa Samudera Indonesia kekurangan fasilitas transportasi pada saat pengurusan visa, protection letter, antar jemput crew dan kapten kapal namun di yard fasilitas dan infrastrukturnya tercukupi. Masalah dan Hambatan dalam penerapan proses *clearance in* dan *out*. Hal ini menghambat manajemen kinerja *Person In Charge*. akibatnya, proses *clearance in* dan *out* keberangkatan kapal menjadi tidak efisien. Penelitian serupa mengenai kinerja *Person In Charge* terhadap efisiensi proses *clearance in* dan *out* dengan mempertimbangkan fasilitas dan infrastruktur dengan demikian, penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan penulis membuat judul **“Manajemen Kinerja *Person In Charge* Terhadap Efisiensi Proses *Clearance In* Dan *Out* Kapal Dengan Fasilitas Dan Infrastruktur Sebagai Variabel Mediasi Pada PT. Pandawa Samudera Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran manajemen kinerja *person in charge*, efisiensi proses *clearance in* dan *out* kapal, fasilitas dan infrastruktur pada PT. Pandawa Samudera Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh manajemen kinerja *person in charge* terhadap efisiensi proses *clearance in* dan *out* kapal?
3. Bagaimana pengaruh manajemen kinerja terhadap fasilitas dan infrastruktur di PT. Pandawa Samudera Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh fasilitas dan infastruktur terhadap proses *clearance in* dan *out* kapal?
5. Bagaimana pengaruh manajemen kinerja *person in charge* terhadap efisiensi proses *clearance in* dan *out* melalui fasilitas dan infrastruktur di PT. Pandawa Samudera Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui gambaran manajemen kinerja *person in charge*, efisiensi proses *clearance in* dan *out* kapal, fasilitas dan infrastruktur pada PT. Pandawa Samudera Indonesia
2. Mengetahui pengaruh manajemen kinerja *person in charge* terhadap efisiensi proses *clearance in* dan *out* kapal?
3. Pengaruh manajemen kinerja terhadap fasilitas dan infrastruktur di PT. Pandawa Samudera Indonesia
4. Mengetahui pengaruh fasilitas dan infastruktur terhadap proses *clearance in* dan *out* kapal
5. Mengetahui pengaruh manajemen kinerja *person in charge* terhadap efisiensi proses *clearance in* dan *out* melalui fasilitas dan infrastruktur di PT. Pandawa Samudera Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi kesalahan dan hambatan yang sering dihadapi oleh perusahaan, serta memberikan nilai tambah dan umpan balik terhadap penilaian inisiatif peningkatan layanan saat ini bagi konsumen layanan.

2. Bagi Peneliti

Penulis mampu mengetahui dan memahami setiap prosedur yang ada, termasuk waktu kedatangan kapal (*clearance in*) dan waktu keberangkatan kapal (*clearance out*), serta fasilitas dan infrastruktur dan manajemen kinerja *person in charge*. Untuk menganalisis suatu masalah, membuat penilaian, dan menarik kesimpulan, peneliti juga dapat memanfaatkan ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan serta pengalaman, wawasan, dan pemahaman praktis.